



Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Analisis persepsi penerima program bantuan swadaya mahan sejahtera (BSMS) provinsi lampung

S Fatimah ^{a,*}, H Wardono ^b, I Sukmana ^c

^{a,*}Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Jl. Kantor Pos No.2 Teluk Betung Bandar Lampung

^bProgram Profesi Insinyur, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandar Lampung

^cProgram Profesi Insinyur, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandar Lampung

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterima : 02 Maret 2022

Direvisi : 16 Maret 2022

Diterbitkan : 24 April 2022

Kata kunci:

Bantuan Swadaya Masyarakat
(BSMS)

Evaluasi

Standar Struktur

Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) merupakan fasilitas dari pemerintah Provinsi Lampung berupa stimulan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan Program BSMS dan untuk melihat hasilnya dari segi keamanan dan standar struktur rumah layak huni penerima bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung. Pelaksanaan BSMS dilakukan melalui kegiatan peningkatan kualitas perumahan dan pemberian stimulan berupa prasarana, sarana dan utilitas. Salah satu desa yang menjadi sasaran program BSMS adalah Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode langsung dengan menyebarkan kuesioner kepada penerima manfaat program BSMS. Hasil penelitian menunjukkan angka persentase untuk evaluasi dengan indikator efektifitas sebesar 77,5 %, indikator efisiensi sebesar 70 %, indikator kecukupan sebesar 76 %, pemerataan sebesar 84%, responsif sebesar 90 %, indikator ketepatan sebesar 100 % serta indikator keamanan dan standar struktur sebesar 100 %.

1. Pendahuluan

Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan memiliki lingkungan yang baik dan sehat juga berhak atas pelayanan kesehatan. Sebagai hak dasar yang fundamental sekaligus prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau (Despa, 2020) bagi setiap orang merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman dijelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah adalah memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Pembangunan adalah suatu perubahan terencana dari suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik (Tjahja, 2000).

Pembangunan merupakan salah satu wujud nyata pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat (Sudjana, 2006). Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah sebagai penyelenggara negara bertugas memecahkan masalah yang ada di masyarakat melalui penyusunan/pembuatan, penetapan/persetujuan dan pelaksanaan kebijakan/program. serta evaluasi untuk melihat sejauh mana suatu kebijakan/program dikatakan berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Maksud kegiatan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) di Provinsi Lampung adalah untuk mendorong dan meningkatkan kemandirian dalam meningkatkan kualitas rumah melalui fasilitasi pemerintah yang bersifat stimulan. Bantuan stimulan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat yang memiliki daya beli terbatas melalui swadaya masyarakat. Sehingga pemenuhan kebutuhan rumah layak huni oleh masyarakat berpenghasilan rendah sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian, disamping itu pembangunan rumah layak huni membutuhkan biaya yang besar sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat miskin. Selain faktor keterjangkauan daya beli masyarakat, pemerintah seharusnya mampu

*Siti Fatimah.

E-mail: gindatien80@gmail.com

memecahkan masalah keterjangkauan daya beli masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni (Murbyanto, 1996).

Sesuai data dari TNP2K Kementerian Sosial pada tahun 2016 yang hingga saat ini menjadi database jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Lampung yaitu 93.752 (sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua ribu) unit.

Berdasarkan jumlah RTLH tersebut sejak tahun 2016 melalui anggaran APBN, RTLH di Provinsi Lampung sudah ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui program dari Kementerian PUPR. Sejalan dengan hal tersebut, dengan harapan dapat mempercepat proses pengurangan RTLH di Provinsi Lampung, ditetapkan Peraturan Gubernur tentang BSMS no. 9 Tahun 2018 dan di review ke dalam Peraturan Gubernur BSMS no. 60 Tahun 2020.

Melalui kebijakan BSMS Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan usaha penurunan jumlah RTLH dengan anggaran APBD. Dari data usulan rumah tidak layak huni yang diajukan pemerintah kabupaten/ kota, implementasi selama periode 2018-2021 telah tercapai 235 unit rumah yang tertangani tersebar di Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung.

Pada prinsipnya BSMS berupaya mendorong masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan rumahnya sendiri secara mandiri, sehingga dengan adanya program ini diharapkan dapat mengembangkan inisiatif swadaya bagi penerima manfaat. Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja, atau dukungan lainnya. Program ini ditujukan agar rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat, rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri PUPR RI No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dimaksud dengan rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi syarat keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kriteria rumah layak huni harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Keselamatan bangunan meliputi: bangunan bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok dan struktur atas

Kesehatan meliputi pencahayaan, sirkulasi udara, dan sanitasi

Luasan minimal $7,2 \text{ m}^2 - 12 \text{ m}^2/\text{orang}$

Pada tahun anggaran 2021, BSMS memfasilitasi 135 unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Dari beberapa desa yang difasilitasi tersebut, maka peneliti memilih Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara karena jumlah penerima bantuan lebih banyak dari desa lainnya yaitu 10 (sepuluh) orang penerima bantuan, selain itu untuk mempermudah peneliti mengambil data minimal jumlah sample melalui kuesioner.

Bentuk bantuan bagi penerima Program BSMS berupa peningkatan kualitas rumah, sementara itu bantuan sarana dan prasarana utilitasnya berupa perbaikan jalan dan drainase merupakan dana sharing dengan APBD kabupaten yang merupakan kesepakatan dengan sebagai dana daerah untuk urusan bersama (DDUB). Untuk menghitung persentase persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat Program BSMS dapat dilakukan dengan formula :

$$\text{Angka Persentase} = \frac{f_{total}}{n_{total}} \times 100\%$$

Secara geografis berdasarkan data Lampung Utara Dalam Angka Tahun 2021, Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara memiliki luas 1.228 ha (sekitar 4 % dari luas keseluruhan Kabupaten Lampung Utara) dengan jumlah penduduk 7.833 jiwa yang terdiri dari 2.218 KK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan BSMS dan melihat hasil capaiannya pada segi keamanan dan standar struktur rumah layak huni penerima bantuan di Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

1.1 Tinjauan Pustaka

Beberapa referensi yang menjadi dasar bagi penelitian ini adalah :

1. Kriteria Rumah Layak Huni

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kriteria rumah layak huni yaitu rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan keukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Selain itu Kepmen Kimpraswil No. 403 Tahun 2002 mengarahkan hal-hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan rumah sederhana sehat layak huni diantaranya :

- a. Kebutuhan minimal masa (penampilan) dan ruang (luar-dalam) (kebutuhan luas)
- b. Kebutuhan kesehatan dan kenyamanan
- c. Kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan.

2. Konsep Evaluasi

Menurut Vedung (2009), "Evaluasi adalah proses penentuan kebaikan, nilai, dan nilai sesuatu". Kemudian Jones mengutip Carol H. Weiss (1991: 356): Evaluasi adalah kata elatis yang mencakup segala macam pertimbangan. Penggunaan kata dalam pengertian umum merupakan istilah untuk menimbang manfaat. Seseorang mengamati dan menelaah suatu fenomena (seseorang, objek, atau ide) berdasarkan beberapa ukuran eksplisit dan implisit. Untuk mendukung pendapat tersebut, secara singkat Jones (1991:356) menyatakan bahwa evaluasi adalah menilai manfaat dari proses dan program pemerintah. Dalam mengevaluasi suatu kebijakan perlu mempertimbangkan beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan. Secara umum, Dunn (2003:610) menjelaskan enam kriteria untuk mengevaluasi kebijakan publik, yang meliputi kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

3. Manfaat dan Tujuan Evaluasi

Stufflebeam dan Shinkfield (2007: 225) mengemukakan bahwa: "Evaluasi adalah komponen vital dari kesehatan organisasi yang berkelanjutan. Jika evaluasi dilakukan dengan baik, organisasi dan orang-orangnya akan memiliki kepuasan mengetahui dengan percaya diri dengan elemen-elemen yang kuat dan dimana perubahan terjadi. Oleh karena itu, evaluasi adalah suatu usaha yang positif." Selain itu, Nugroho (2009:535-536) berpendapat bahwa tujuan utama evaluasi bukanlah untuk menyalahkan, tetapi untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara capaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan, sehingga evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang positif. Evaluasi bertujuan untuk menemukan kekurangan dan menutupi kekurangan. Kemudian Chelimsky, Jose Hudson, John Mayne dan Ray Thomlison dalam

Evert Vedung (2009:101) mengemukakan bahwa ada empat tujuan evaluasi, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan penyampaian program, menimbang kembali arah program, dan memberikan akuntabilitas.

4. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena adanya hubungan kepercayaan masyarakat. Harbani Pasolong (2010 : 221-222) mengatakan : “Semakin baik pemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat.” Kepmenpan No. 63. Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyebutkan : “Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan, kepuasan pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.”

5. Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS)

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2018 tentang BSMS adalah bantuan Pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam upaya peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya. Bantuan pemerintah tersebut bersifat stimulan yang mengandung makna sebagai salah satu cara untuk mewujudkan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat yang memiliki daya beli terbatas melalui swadaya masyarakat. Keswadayaan merupakan hal penting dalam pelaksanaan program ini karena dapat mempengaruhi pencapaian output kegiatan berupa rumah layak huni. Masyarakat penerima program harus terlibat aktif dalam seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Peran aktif ini diharapkan mampu mengunggah rasa komitmen masyarakat terhadap program dan rasa memiliki rumah karena rumah merupakan aset pemilik atau penerima manfaat program (Zulmiftahul, 2021). Masyarakat penerima bantuan adalah yang telah melalui proses verifikasi dan memenuhi persyaratan penerima bantuan yang masuk dalam kriteria. Bantuan yang diberikan berupa bahan bangunan yang dibutuhkan untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Dalam Peraturan Menteri PUPR No. 22/2008, bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi tiga syarat, yakni keselamatan bangunan, rumah harus menjamin kesehatan penghuninya dan memiliki luasan yang cukup. Sehingga perbaikan rumah tidak layak huni menghasilkan output yang diharapkan.

2. Metodologi

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan (Nama, 2019) dan wawancara terstruktur menggunakan kuesioner kepada masyarakat di Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Dalam pengumpulan data (Martinus, 2021), peneliti dibantu oleh fasilitator dari Konsultan Manajemen Provinsi pada program BSMS. Untuk analisis data dalam penelitian ini adalah mengolah data secara manual dengan bantuan program *Microsoft Excel* dan menampilkannya menggunakan diagram batang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah respon masyarakat yang telah menerima bantuan program BSMS tersebut.

3. Hasil dan pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan kepada masyarakat di Desa Penagan Ratu tentang persentase jawaban

kuesioner mengenai kajian capaian kelayakan struktur program BSMS bagi masyarakat penerima bantuan, dibagi menjadi 7 kelompok indikator pertanyaan, 6 kelompok merupakan indikator dari kriteria evaluasi menurut Dunn (2003:610) dan yang 1 kelompok merupakan kriteria berdasarkan Permen PUPR RI No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melihat hasil capaian pada segi keamanan dan standar struktur rumah layak huni.

3.1 Efektifitas

Efektivitas menurut Sondang dalam Othenk (2008 : 4) adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankan. Pelaksanaan Program BSMS di Kabupaten Abung Timur sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi masyarakat khususnya yang memperoleh bantuan.

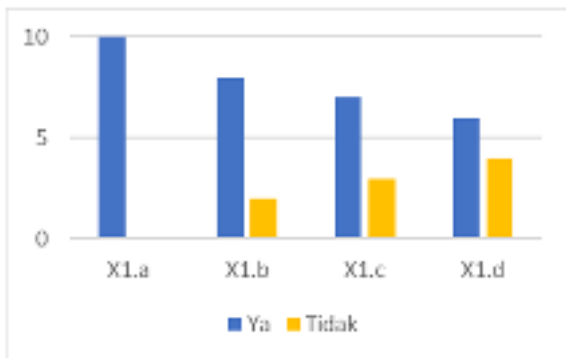
Berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan program BSMS ini dapat dikatakan berhasil karena diterima dengan cukup baik oleh masyarakat. Peran aktif masyarakat dengan program ini cukup baik, karena memberikan motivasi dan harapan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, agar mereka mau dan berupaya dalam menciptakan kondisi perumahan yang layak secara fisik, sosial, ekonomi dan sehat. Dalam pelaksanaannya masyarakat diharapkan mampu berswadaya dan bergotong-royong dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni.

Untuk mengetahui efektifitas Program BSMS, peneliti menggunakan 4 indikator pertanyaan mengenai Program BSMS, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Efektifitas Program BSMS

No.	Pertanyaan
X1.a	Apakah Program BSMS dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis yang disampaikan Fasilitator di lapangan?
X1.b	Apakah kondisi rumah sudah menjadi lebih baik sesuai yang diusulkan dalam proposal?
X1.c	Apakah ada gotong royong dengan sesama penerima bantuan?
X1.d	Apakah biaya bantuan sudah mencukupi?

Hasil dari 4 (empat) indikator di atas dapat diketahui bahwa pemanfaatan BSMS yang telah dinikmati oleh masyarakat sudah baik dan efektif walaupun terdapat 1 (satu) indikator yang menyatakan bahwa biaya tidak cukup, karena upah tukang yang kurang mencukupi. Untuk upah tukang dan material lainnya diharapkan dari adanya swadaya masyarakat penerima bantuan, seperti batu kali dapat diperoleh dari alam tanpa harus membelinya di toko bangunan atau kayu dari bongkaran rumah yang masih bisa dan baik dipakai. Sebenarnya secara konsep kebutuhan anggaran untuk tukang tidak diperlukan karena diharapkan adanya gotong royong diantara para penerima atau warga masyarakat, namun kenyataan di lapangan walaupun ada gotong royong tapi tidak banyak masyarakat penerima bantuan faham tentang pertukangan, sehingga tenaga tukang sangat diperlukan dalam pelaksanaan ini.



Gbr 1. Grafik Efektifitas

Dari Gambar 1 dapat dijabarkan bahwa jumlah masyarakat dengan persepsi pada pelaksanaan sesuai petunjuk teknis dan adanya gotong royong sebanyak 10 orang atau dengan kata lain angka persentase 100% sementara untuk persepsi mengenai kondisi rumah berubah dan biaya yang tidak mencukupi masing-masing 7 orang dan 6 orang yaitu pada angka persentase 80 % dan 40 %. Sehingga jika dirata-rata angka persentase indikator efektifitas yaitu sebesar 77,5 %.

3.2 Efisiensi

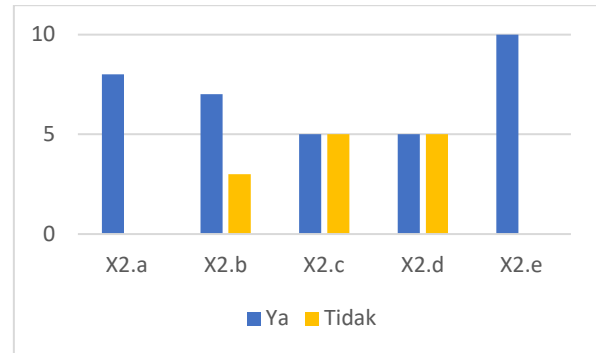
Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar (Stoner, 1994 : 9). Menurut SP. Hasibuan (1984 :233-4) yang mengutip dari H. Emerson, efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Penerima bantuan BSMS adalah masyarakat yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah namun memiliki lahan untuk dibangun rumah. Selain itu, mereka belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni RTLH. Termasuk belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah. Pelaksanaan BSMS ini dapat dikatakan efisien atau tidak dilihat dari proses pelaksanaannya, apakah proses pelaksanaan berjalan dengan baik. Seberapa banyak upaya masyarakat penerima bantuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keinginan kuat masyarakat untuk memiliki rumah layak huni yang sehat seharusnya berbanding lurus dengan usaha yang dilakukan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program ini termasuk kepatuhan masyarakat terhadap jadwal yang sudah ditentukan. Bagaimana sosialisasi di tingkat masyarakat dibangun oleh pelaksana dari Dinas PKPCK juga oleh fasilitator itu pun menjadi indikator yang harus diperhatikan. Untuk mengetahui efisiensi digunakan 5 indikator pertanyaan terkait Program BSMS, seperti ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Efisiensi Program BSMS

No.	Pertanyaan
X2. a	Apakah waktu yang dibutuhkan program BSMS ini cukup atau lama?
X2. b	Apakah waktu yang dijalankan sesuai jadwal?
X2. c	Apakah waktu untuk proses pencairan cukup atau lama?
X2. d	Apakah sosialisasi yang diberikan cukup?
X2. e	Apakah pendamping/fasilitator mendampingi sampai selesai?

Dari hasil data efisiensi didapat bahwa dari segi waktu dirasa sudah cukup dan sesuai jadwal walaupun di akhir pekerjaan ada beberapa penerima manfaat yang mengalami keterlambatan

waktu dikarenakan menunggu tukang yang membantu masih membantu tetangga penerima BSMS lainnya, dikarenakan jumlah tenaga tukang di desa Penagan Ratu sangat terbatas. Pendampingan oleh fasilitator sangat baik dan membantu sampai selesai pekerjaan fisik.



Gambar 2. Grafik Efisiensi

Dari Gambar 2 dapat dijabarkan bahwa 10 orang masyarakat dengan persepsi pada pendampingan oleh fasilitator sangat baik dan sampai selesai atau dengan angka persentase 100%. Sementara untuk persepsi terendah terjadi pada lamanya waktu pencairan anggaran dan sosialisasi yang dirasa kurang oleh masyarakat yaitu masing-masing beranggapan 5 orang dengan angka persentase 50 %. Jika dirata-rata angka persentase indikator efisiensi yaitu sebesar 70 %.

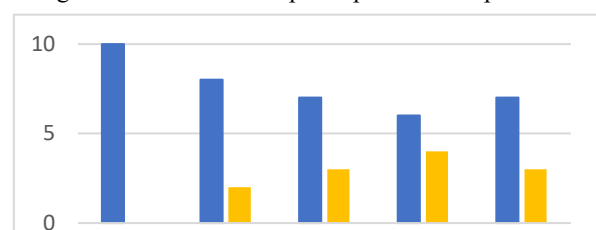
3.3 Kecukupan

Pengertian kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan bahwa tujuan yang telah dicapai (Sulistiono, 2021) telah dirasakan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi oleh penerima manfaat. Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah. Pada Tabel 3 dapat dilihat indikator pertanyaan terkait kecukupan pada program BSMS.

Tabel 3. Kecukupan Program BSMS

No.	Pertanyaan
X3.a	Apakah masyarakat berusaha menyelesaikan pekerjaan?
X3.b	Apakah rumah yang diperbaiki sesuai kriteria layak huni?
X3.c	Apakah ada sanitasi ?
X3.d	Apakah ada sumur ?
X3.e	Apakah ada septik tank?

Berdasarkan indikator yang ditampilkan pada Tabel 3, maka tingkat kecukupan yang menjadi hal penting pada program BSMS yaitu bagaimana perubahan pada masyarakat selama menjalankan program, apakah dari sikap dan pola pikir termasuk perilaku mengalami peningkatan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Selain itu termasuk juga kecukupan rumah tidak layak huni menjadi layak huni, ketersediaan sanitasi untuk mandi, cuci dan kakus (MCK) serta ketersediaan sumur guna air bersih. Kebutuhan indikator tersebut sudah terpenuhi atau belum harus menjadi hal prinsip untuk mencapai kriteria layak huni pada program BSMS ini. Berikut ini gambaran persepsi masyarakat mengenai indikator kecukupan seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Kecukupan Program BSMS

Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa masyarakat berusaha menyelesaikan pekerjaannya sejumlah 10 orang atau dengan angka persentase 100%, sejumlah masyarakat penerima yang rumahnya terbangun tidak semua masuk dalam kriteria layak huni karena kecukupan luasan ada yang tidak mencukupi, yaitu sejumlah 2 orang penerima tidak mencukupi luasannya atau 20% angka persentase, dan untuk sanitasi, sumur dan septik tank tidak mencapai 100% angka persentasenya. Sementara faktor kecukupan sanitasi, sumur dan ketersediaan *septik tank* merupakan factor penting juga dalam pencapaian kesehatan di masyarakat. Sehingga jika dirata-rata angka persentase indikator kecukupan yaitu sebesar 76 %.

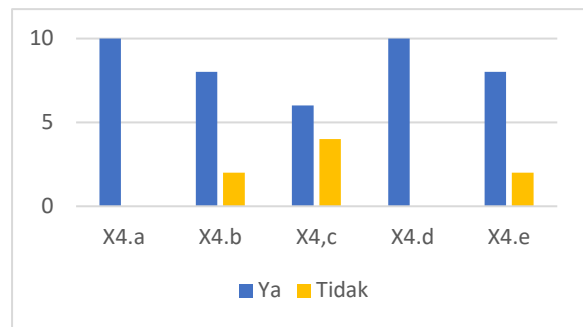
3.4 Pemerataan

Pemerataan dalam suatu program dapat diartikan sebagai suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari suatu program. Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan oleh peneliti terkait gejala penyaluran dana yang sudah dilakukan secara adil, yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa Penagan Ratu. Masyarakat penerima program juga mengatakan menerima transfer dana untuk membeli material dan upah tukang sama rata dan sama jumlah. Namun karena di Desa Penagan Ratu masih banyak warga masyarakatnya menempati rumah tidak layak huni dan belum mendapatkan bantuan program BSMS atau sejenis, program ini masih belum bisa dikatakan merata untuk masyarakat yang lain. Jika tidak diberikan sosialisasi dengan pendekatan persuasif yang baik, maka rentan terjadi perbedaan pendapat dan protes dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Berikut ini Tabel 4 berisi pertanyaan dari indikator pemerataan.

Tabel 4. Pemerataan Program BSMS

No	Pertanyaan
X4.a	Apakah anggaran biaya yang diberikan sama rata ?
X4.b	Apakah masih ada tetangga yang ingin mendapatkan bantuan serupa?
X4.c	Apakah ada tetangga yang protes?
X4.d	Apakah ada tetangga dengan kriteria rumah yang sama dengan bpk/ibu tapi tidak mendapatkan bantuan?
X4.e	Apakah tetangga yang tidak mendapat bantuan mendukung atau bergotong royong membantu?

Dari hasil data pemerataan didapat bahwa dari segi biaya yang diterima, masyarakat merasa adil karena sama rata walaupun sebenarnya kebutuhan masing-masing penerima bantuan berbeda. Adanya tetangga yang protes dan ingin mendapat bantuan juga masih dikatakan wajar, bahkan banyak pula diantara masyarakat yang mampu, membantu dengan memberikan bantuan material untuk penerima bantuan. Pola pemerataan BSMS dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pemerataan BSMS

Gambar 4 di atas dapat diartikan bahwa 10 orang masyarakat dengan persepsi pada jumlah anggaran yang didapat setiap penerima bantuan adalah sama atau dengan angka persentase 100 %. Hal ini sejalan dengan persepsi keinginan masyarakat lain mendapatkan bantuan serupa, sedangkan untuk persepsi terendah terjadi pada adanya tetangga yang protes sejumlah 6 orang atau dengan kata lain sebesar 60 %. Dengan demikian jika dirata-rata angka persentase indikator pemerataan yaitu sebesar 84 %.

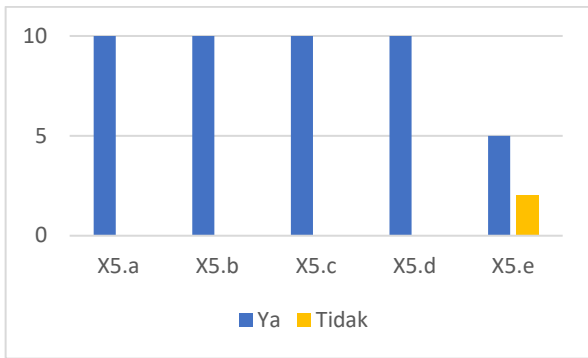
3.5 Responsif

Responsifitas dapat juga dikatakan respon dari suatu aktivitas. Menurut William N Dunn bahwa indikator responsifitas itu dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat (Dunn, 2000 : 437). Kriteria responsifitas melihat kesesuaian antara program BSMS dengan keinginan masyarakat ataupun kebutuhan masyarakat. Berkenaan dengan seberapa jauh suatu program dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok masyarakat penerima bantuan. Kriteria responsifitas adalah penting karena merupakan indikator yang dapat mengetahui kepuasan kriteria lainnya.

Tabel 5. Responsif Program BSMS

No	Pertanyaan
X5.a	Apakah masyarakat merasakan manfaat program BSMS?
X5.b	Apakah senang berada di rumah yang sekarang?
X5.c	Apakah lingkungan rumah jadi lebih sehat?
X5.d	Apakah senang bergotong royong?
X5.e	Apakah sulit mengumpulkan material/ swadaya ?

Dari hasil indikator responsif diketahui bahwa hampir seluruh masyarakat penerima bantuan merasakan manfaat dengan adanya program BSMS. Mereka senang berada di rumah yang sudah diperbaiki dan lingkungan menjadi sehat, walaupun ada diantara mereka yang belum memiliki fasilitas sanitasi. Namun sudah ada rencana akan memperbaikinya jika sudah ada biaya, dan adanya pola gotong-royong menyebabkan masyarakat menjadi lebih terbantu dan senang. Sedangkan dalam hal mengumpulkan material atau swadaya, beberapa diantara mereka ada yang kesulitan, namun dapat terbantu dengan bantuan tetangga dan usaha mereka masing-masing. Gambaran kriteria responsif dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Responsif Masyarakat

Dari Gambar 5 dapat diketahui bahwa rata-rata responsif masyarakat yaitu sebanyak 10 orang, dengan kata lain 100 % masyarakat merasakan hal yang baik. Persepsi yang mengalami penurunan sedikit yaitu sulitnya mereka mengumpulkan material atau biaya tukang guna swadaya ada di angka persentase 50 % atau dengan jumlah 5 orang yang merasa sulit. Sehingga jika dirata-rata angka persentase indikator responsif yaitu sebesar 90 %.

3.6 Ketepatan

Ketepatan mengarah pada kekuatan asumsi yang mendasari tujuan ini. Secara keseluruhan, dampak positif dari pelaksanaan program ini dapat dirasakan, dimana masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dari yang awalnya tidak ada menjadi ada. Dampak positif yang dirasakan adalah masyarakat termotivasi untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya, karena dari awal program, keterlibatan mereka merupakan faktor utama program ini. Di sisi lain, selain berdampak positif, program ini ternyata juga berdampak negatif. Selain dampak positif ada pula dampak negatif akibat dari program BSMS ini yaitu adanya konflik sosial diantara masyarakat, antara masyarakat yang tidak menerima bantuan, tapi memiliki kondisi yang sama dengan penerima bantuan, yang otomatis dapat menimbulkan kecemburuan. Namun semuanya dapat diatasi dengan komunikasi dan mediasi diantara para pelaksana dari Dinas PKPCK Provinsi Lampung dan masyarakat.

Berikut ini melalui Tabel 6 dapat diketahui data yang didapat dari indikator Ketepatan Program BSMS.

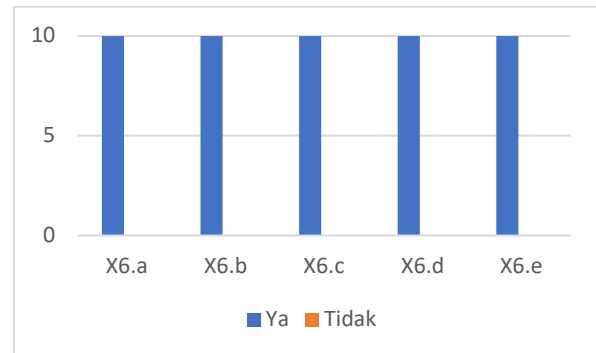
Tabel 6. Ketepatan Program BSMS

No	Pertanyaan
X6.a	Apakah Program BSMS tepat sasaran ?
X6.b	Apakah rumah terbangun sesuai rencana ?
X6.c	Apakah masyarakat mengeluarkan swadaya nya ?
X6.d	Apakah toko yang dipilih hasil rebug penerima ?
X6.e	Apakah penerima bantuan sesuai kriteria ?

Ketepatan program BSMS di Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara menunjukkan hal yang positif. Hal ini dapat dilihat dari hasil program tersebut di tahun 2021. Rumah tidak layak huni di desa tersebut yang mendapat bantuan program BSMS berganti menjadi rumah layak huni yang lebih sehat untuk ditempati oleh keluarga. Ruma yang terbangun pun sudah direncanakan terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritasnya. Bahkan dengan semangat dan usahanya masyarakat penerima bantuan untuk mengusahakan bentuk keswadayaan mereka, dalam bentuk

material ataupun tenaga. Toko yang dipilih telah sesuai dengan ketentuan dan hasil rebug masyarakat dan penerima bantuan pun telah sesuai kriteria penerima BSMS.

Tampilan ketepatan program BSMS dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Ketepatan Program BSMS

Dari Gambar 6 dapat diketahui rata-rata persepsi masyarakat penerima bantuan dengan indikator ketepatan yaitu sebesar 10 orang, dengan kata lain angka persentase persepsi mereka mencapai 100%. Jika dirata-rata angka persentase indikator ketepatan yaitu sebesar 100 %.

3.7 Keamanan dan Standar Struktur

Untuk mendukung fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik dan layak, syarat fisik harus dipenuhi yaitu aman sebagai tempat berteduh, terpenuhinya rasa nyaman secara mental dan secara sosial mampu menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi sarana bagi pelaksanaan bimbingan dan pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga. Untuk membuat rumah yang aman dan memenuhi kriteria layak huni, harus mengikuti aturan dan petunjuk teknis dalam pembangunannya. Kualitas dan kelayakan bangunan harus ditingkatkan. Jadi selain aman dan nyaman juga layak huni.

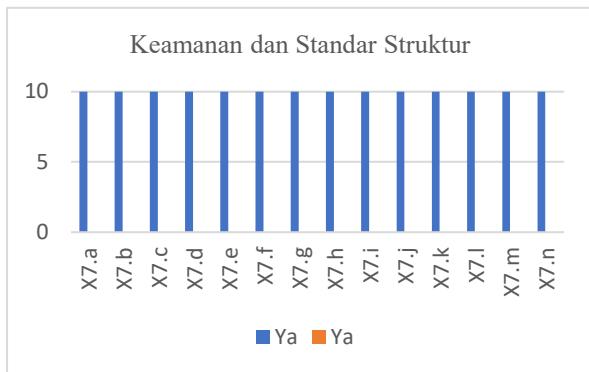
Pada program BSMS ini, secara teknis pelaksanaannya harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat (RKS). Untuk menilai kelayakan struktur yang dilakukan, kuesioner yang diberikan kepada responden penerima manfaat dengan menggunakan 14 indikator pertanyaan terkait keamanan dan standar struktur program BSMS, seperti ditampilkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Keamanan dan Standar Struktur

No	Pertanyaan
X7.a	Apakah bahan bangunan yang diantar toko sesuai RAB ?
X7.b	Apakah dalam pembangunan rumah menggunakan pondasi batu kali ?
X7.c	Dalam pembuatan pondasi apakah menggunakan perbandingan 1:4 untuk semen dan pasir ?
X7.d	Apakah batu kali yang digunakan batu belah ?
X7.e	Apakah ada penggunaan slof ?
X7.f	Apakah besi yang digunakan dalam pembuatan slof menggunakan besi diameter 10 untuk tulangan utama dan besi diameter 8 untuk tulangan sengkang ?

X7.g	Perbandingan yang digunakan dalam pengecoran slof apakah menggunakan campuran 1 : 2 : 3 untuk semen, pasir, kerikil ?
X7.h	Apakah ada penggunaan kolom ?
X7.i	Apakah besi yang digunakan dalam pembuatan kolom menggunakan besi diameter 10 untuk tulangan utama dan besi diameter 8 untuk tulangan sengkang ?
X7.j	Perbandingan yang digunakan untuk pengecoran kolom apakah menggunakan campuran 1 : 2 :3 untuk semen, pasir dan kerikil ?
X7.k	Apakah menggunakan balok ?
X7.l	Apakah besi yang digunakan dalam pembuatan balok menggunakan besi diameter 10 untuk tulangan utama dan besi diameter 8 untuk tulangan sengkang ?
X7.m	Perbandingan yang digunakan dalam pengecoran balok apakah menggunakan campuran 1 : 2 : 3 untuk semen, pasir dan kerikil ?
X7.n	Apakah rangka kuda-kuda menggunakan kayu dengan kondisi layak ?

Dari kuesioner yang ditampilkan pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa keamanan dan standar struktur pada indikator di atas sudah diterapkan dengan baik oleh masyarakat dalam pelaksanaan program BSMS. Masyarakat dalam perencanaan ini didampingi oleh tenaga fasilitator yang memberikan advice teknik kepada para penerima bantuan, sehingga untuk keamanan dan standar struktur rumah layak huni menjadi terpenuhi. Pola Keamanan dan Standar Struktur dapat dilihat pada Gambar 7.



Dari Gambar 7 dapat diartikan bahwa keseluruhan kuesioner untuk mengetahui keamanan dan standar struktur untuk rumah yang diperbaiki terisi persepsi sebanyak 10 orang yang mengisi ‘Ya’ yang artinya rumah yang terbangun telah sesuai syarat-syarat keamanan dan standar struktur bagi rumah layak huni, dengan angka persentase indikator keamanan dan standar struktur adalah 100 %.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh angka persentase masyarakat penerima program BSMS pada indikator efektifitas sebesar 77,5 %. Angka persentase masyarakat penerima program BSMS pada indikator efisiensi sebesar 70 %. Angka persentase masyarakat penerima program BSMS pada indikator kecukupan sebesar 76 %. Angka persentase masyarakat penerima program BSMS pada indikator pemerataan sebesar 84%. Angka persentase masyarakat penerima program BSMS pada indikator responsif sebesar 90 % . Angka persentase masyarakat penerima program BSMS pada indikator ketepatan sebesar 100 %. Angka persentase masyarakat penerima program BSMS pada indikator keamanan dan standar struktur sebesar 100 %. Dari data hasil evaluasi tersebut peneliti dapat memberikan saran yaitu d iperhatikan kembali jumlah biaya yang mencukupi pada program BSMS ini dengan memperhatikan biaya tukang. Dicermati untuk masalah waktu pencairan yang sangat lama yang diperkirakan sekitar 2 bulan sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan tidak terlalu lama selain itu diadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat oleh pelaksana. Yang harus diperhatikan kriteria rumah layak huni yaitu mementingkan aspek kesehatannya juga, sebaiknya dalam memperkirakan anggaran untuk rumah layak huni selalu memperhitungkan akses sanitasi dan air bersihnya. Masih dijumpai rumah yang sudah diperbaiki tampak kuat sesuai standar struktur dan kriteria lainnya, namun tidak memiliki sarana MCK dan air bersih, Selain karena anggaran dimungkinkan karena keterbatasan lahan untuk dapat dibangun sarana tersebut secara komunal; Adanya masyarakat yang memiliki nasib sama dengan penerima bantuan tetapi tidak mendapat akses bantuan sehingga diharapkan pelaksana yaitu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung lebih cermat lagi menyikapi indikator pemerataan ini meskipun permasalahan ini dapat diatasi dengan pendekatan persuasif. Namun alangkah lebih baik dapat difasilitasi dengan anggaran tambahan kepada anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten sehingga jumlah penerima BSMS lebih banyak lagi. Selain itu dengan jumlah penerima manfaat yang banyak dapat mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Lampung.

Ucapan terima kasih
 Penulis diharapkan menuliskan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian artiklenya. Ucapan terima kasih kepada Hibah Penelitian dipersilahkan menuliskan Nama Hibah dan Nomer Kontraknya.

Daftar pustaka

Abdurahmat. 2008. Efektifitas Organisasi Edisi Pertama. Jakarta : Airlangga.

Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Despa, Dikpride and Widyawati, Ratna and Purba, Aleksander and Septiana, Trisya (2020) Edukasi Implementasi Undang – Undang Keinsinyuran Pada Aparatur Sipil Negara (Asn) Pemerintahan Kabupaten Di Lampung. Prosiding Senapati Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Teknologi Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0. Pp. 47-50. Issn 2685-0427

Jones, Charles. 1991. An Introduction to study of Public Policy, diterjemahkan Ricky Istamto. Jakarta : CV. Rajawali

Kepmen Kimpraswil No. 403 Tahun 2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.

Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Lampung Utara Dalam Angka. 2021. Profil Desa Penagan Ratu Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

Murbyanto. 1996. Strategi Pembangunan Desa di Indonesia. Yogyakarta : Aditya Media.

Nugroho, Riant. 2007. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : Elek Media Komputindo.

Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta

Peraturan Gubernur Lampung. 2020. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2020. Tentang Pedoman Pelaksanaan BSMS dan BSPW.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/2018. Tentang Stimulan Perumahan Swadaya.

Nama, G. F., Pamungkas, A. D., Mardiana, M., & Septama, H. D. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Koleksi Permainan Aksara Lampung (Koper Apung) Berbasis Android Menggunakan Metode Scrum. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 6(4), 420-429.

Permen PUPR No. 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Republik Indonesia. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 Tentang Perumahan & Kawasan Permukiman. Jakarta : Kementerian PUPR

Martinus; Djausal, Gita Paramita; Sulistiyanti, Sri Ratna; Muhammad, Meizano Ardhi and Telaumbanua, Mareli (2021) Tebakak Leaves Plates as an Eco-friendly Disposable Plates: Cultural Roots, Technology and People Transformations. In: 2nd International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS 2021), 26-27 October 2021.

Sulistiono, Wahyu Eko and Muhammad, Meizano Ardhi and Andrian, Rico and ., Martinus and Nama, Gigih Forda and S, Ghuffrony Rezaldhy and Annisa, Resty and Mulyani, Yessi and Djausal, Anisa Nuraisa (2021) Virtual Reality as Learning Media for Lampung Historical Heritage. In: International Conference on Converging Technology in Electrical and Information Engineering (ICCTEIE), 27-28 October 2021.

Stoner, James A.F., terjemahan Sirait, Alfonsus. 1990. Manajemen. Jakarta : Erlangga.

Stufflebeam, Daniel L, dan Shinkfield, Anthony J. 2007. Evaluation Theory, Models and Application. San Fransisco : Jossey-Bass.

Sudjana, Nana. 2006. Penilaian Hasil Belajar Mengajar. Bandung : Remaja Rosdakarya

Tjahya, Supriatna. 2000. Prinsip-prinsip Pembangunan. Jakarta : Rineka Cipta.

Vedung, Evert. 2009. Public Policy and Program Evaluation. New Brunswick (USA) : Transaction Publisher./;m,

Zulmiftahul, Huda and Khairudin, Khairudin and Lukmanul, Hakim and Zebua, Osea (2020) Pelatihan Instalasi Sistem Plts Bagi Siswa-Siswi Di Smk 2 Mei Bandar Lampung. Prosiding Senapati Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Teknologi Dan Inovasi, 2. Pp. 285-288. Issn: 2685-0427